

## BAGAIMANA GENERASI Z MEMANDANG MODAL SOSIAL KANDIDAT PEREMPUAN?

### HOW GENERATION Z VIEWS THE SOCIAL CAPITAL OF FEMALE CANDIDATES?

Ainur Rofieq<sup>1</sup>, Lucky Purwantini<sup>2</sup>, Muhammad Fadil<sup>3</sup>, Ega Danar Ekayana<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam 45

<sup>2</sup> Program Studi Psikologi, Universitas Islam 45

e-mail: ainur.rofieq75@gmail.com

#### Abstrak

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 sudah berakhir. Banyak kandidat, baik kandidat laki-laki maupun perempuan mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif sudah memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Namun, dari berbagai survey yang dilakukan menunjukkan kandidat perempuan masih belum populer serta memiliki elektabilitas yang rendah, khususnya pada kandidasi calon presiden. Generasi Z sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula. Sebagai generasi mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi internet, sehingga mereka sangat melek internet. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Generasi Z terhadap kandidat perempuan ditinjau dari aspek modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Responden adalah mahasiswa yang termasuk kategori Generasi Z. Berdasarkan jawaban responden sebanyak 55 mahasiswa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi terhadap kandidat perempuan ditinjau dari jenis kelamin dan jenis pemilih. Namun ditinjau dari interaksi jenis kelamin dan jenis pemilih terdapat perbedaan yang signifikan dimana antara pemilih pemula perempuan dan bukan pemilih perempuan memiliki perbedaan persepsi terhadap kandidat perempuan dibandingkan pemilih pemula laki-laki dan bukan pemilih pemula perempuan.

**Kata Kunci:** Kandidat perempuan, modal sosial, generasi Z

#### Abstract

The implementation of the 2024 simultaneous elections has ended. Many male and female candidates, as well as running for executive and legislative positions have introduced themselves to the public. However, various surveys show that female candidates are still unpopular and have low electability, especially presidential candidates. Generation Z voters can be categorized as first-time voters. As a generation, they have different characteristics from previous generations. They were born during the development of internet technology, so they are very internet literate. Therefore, this study aims to find out Generation Z's views toward female candidates from the perspective of social capital. The research method uses a quantitative descriptive approach. Based on the answers of 55 students, it was shown that there was no significant difference between the perception of female candidates in terms of gender and type of voters. However, judging from the interaction of gender and type of voters, there is a significant difference between female and non-female first-time voters. There is a difference in the perception of female candidates compared to male and non-female first-time voters.

**Keywords:** woman candidate, social capital, Generation Z

## I. Pendahuluan

Dalam sistem politik demokrasi disepakati cara mengisi jabatan-jabatan politik melalui suatu pemilu yang periodik, terbuka, bebas dan adil. Schumpeter (2013:411) memaknai demokrasi sebagai sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik,

dimana individu-individu memperoleh kekuasaan memutuskan melalui sebuah pertarungan yang kompetitif dalam memperebutkan suara rakyat. Dalam politik demokrasi juga berlaku hukum kesamaan derajat antar semua jenis kelamin, artinya semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan terbuka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang bermakna ada pengakuan hak memilih dan dipilih yang setara (Sharma, 2014).

Namun demikian, pada kenyataannya pengakuan terhadap kiprah perempuan tidak menunjukkan hal yang positif. Dalam laporan Human Development Report Tahun 2020 bahwa Gender Inequality Index (GII) di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan GII dunia, yakni 0.48 berbanding 0.436. Demikian pula keterwakilan perempuan di parlemen di Indonesia lebih rendah dibandingkan rerata dunia, yakni 17.4 berbanding 24.6.

Sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 perempuan Indonesia sudah punya hak pilih (*right to vote*). Namun sampai sekarang hak pilih perempuan tersebut belum menghasilkan keterwakilan yang seimbang dalam Lembaga legislatif maupun untuk jabatan-jabatan eksekutif yang diisi melalui pemilu. Sejak pemilu 2004, guna mencapai kesetaraan keterwakilan perempuan (representatif), pemerintah telah menerbitkan kebijakan aksi afirmasi melalui sistem kuota 30% bagi lembaga-lembaga strategis, terutama lembaga legislatif dan partai politik (Kartikasari, 2013). Kebijakan afirmasi kuota ini makin dikuatkan sejak pemilu 2009 melalui kebijakan sistem selang-seling (*zipper system*) dalam penyusunan daftar calon (Bessel, 2010). Svedova (2005: 33-34) mengkategorikannya atas hambatan politik, sosio-ekonomi, dan psikologis atau sosio-kultural.

Begitupun program aksi afirmasi berupa sistem kuota 30% dan sistem *zipper* untuk menominasikan perempuan di pemilu legislatif nyatanya belum mampu mendorong perempuan masuk ke parlemen secara mudah. Kebijakan *legal-quota* ini masih membutuhkan sejumlah prasyarat, seperti sistem pemilu proporsional tertutup yang lebih ramah kepada perempuan dan mengadopsi *voluntary party-quota*. Temuan Bessel (2010) dari 15 negara demokrasi yang jumlah perempuan di lembaga legislatif mencapai 30%, sebanyak 13 negara memakai sistem proporsional. Jika sejak Pemilu 1955 Indonesia menggunakan sistem proporsional, namun jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR tetap kecil, Bessel (2010) melihatnya sebagai persoalan komitmen partai.

Sementara itu riil politiknya, bahwa faktor kedekatan kandidat perempuan dengan elit parpol dan elit penguasa masih signifikan dalam pencalonan dan keterpilihan di DPR dan DPRD. Fitriyah dan Supratiwi (2015), menunjukkan program aksi afirmasi dalam pemilu legislatif belum sukses mempercepat capaian kesetaraan proporsi lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki di parlemen, juga belum memberi jaminan kesempatan yang sama di antara para perempuan itu sendiri. Partai politik juga belum mengembangkan sistem kaderisasi yang kuat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan, padahal peran partai politik sangat strategis dalam pencalonan (Wulandari dan Agustyati (dkk), 2014:64; Rahayu, 2014:30-32).

Bagi perempuan, agar terpilih sebagai anggota parlemen memiliki tiga hambatan penting dalam proses seleksi pencalonan yang dilakukan oleh partai sebagai kandidat dan akan diseleksi oleh pemilih saat pemilu (Matland, 2005: 93). Pada semua tahapan ini

perempuan menjumpai hambatan, jika tahap pertama adalah hambatan internal, maka hambatan kedua dan ketiga adalah hambatan eksternal. Terdapatnya hambatan perempuan untuk terjun di politik bisa dibaca dari siapa saja perempuan yang terjun dan memperoleh jabatan politik. Widaryanto dan Pramono dalam Djojosoekarto dan Sandjaja (2008) mengklasifikasikannya dalam tiga kelompok, yakni: (1) memperoleh jabatan politik karena memiliki hubungan tertentu dengan laki-laki (pejabat legislatif/eksekutif) sebagai istri atau anak; (2) sudah terbebas dari tugas membesarkan anak-anaknya; dan (3) kelompok usia muda, umumnya para aktivis (ormas, LSM atau organisasi ektra kampus). Selain hambatan tersebut, tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik formal berupa biaya politik, partai pengusung, dan faktor relasi keluarga (Fauziah et al., 2023).

Faktor modal sosial dapat digunakan oleh kandidat untuk meraih dukungan. Konsep yang dikembangkan oleh Bourdieu, Coleman, Putnam, dan Fukuyama menyatakan bahwa hanya kelompok-kelompok masyarakat memiliki seperangkat nilai sosial dan budaya yang menghargai pentingnya kerjasama yang dapat maju dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Dalam modal sosial memiliki elemen-elemen, seperti kepercayaan, upaya-upaya kooperatif antar anggota organisasi, *mutual affection*, dan penciptaan jaringan sosial.

Berdasarkan kandidasi perempuan dalam politik, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan dalam pandangan generasi Z ditinjau dari aspek modal sosial. Pemilihan generasi Z sebagai lokus dikarenakan karakteristik generasi tersebut yang lahir di era internet sudah berkembang pesat. Selain itu, saat ini populasi generasi Z menjadi yang terbesar diantara generasi-generasi yang ada di Indonesia. Sehingga pandangannya akan menjadi perhatian bagi para kandidat dan partai politik.

## II. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang menguji kecenderungan atau pola untuk dua (atau lebih) variabel secara konsisten (Creswell, 2012).

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi dan universitas di Bekasi. Adapun teknik pengambilan sampelnya menggunakan *convenience sampling technique*. (Creswell, 2012) menyatakan bahwa walaupun dengan teknik ini peneliti tidak dapat mengatakan bahwa sampel tersebut mewakili populasi, namun mereka dapat memberikan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis. Dikarenakan penelitian kami masih merupakan kajian awal, jadi penggunaan teknik sampling *convenience* menurut kami sudah cukup.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 skala, yaitu skala persepsi generasi Z terhadap kandidat perempuan, skala modal sosial, dan skala perilaku pemilih. Ketiga skala tersebut menggunakan literatur ilmu politik yang diadaptasi ke tahap-tahap penyusunan skala psikologi.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistika korelasi Pearson Product Moment. Korelasi Pearson Product Moment merupakan uji statistika yang menguji dua variabel atau lebih.

Tahapan penelitian ini adalah *pertama*, subjek penelitian akan diberikan *informed consent* yang di dalamnya termuat penjelasan mengenai etika penelitian seperti kerahasiaan data pribadi dan penggunaannya yang hanya sebatas pada keperluan akademis. *Informed consent* dan penjelasan mengenai etika penelitian diberikan dalam bentuk *google forms*. *Kedua*, jika subjek penelitian menyetujui untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, maka peneliti meminta subjek untuk menandatangani lembar persetujuan. *Ketiga*, Subjek penelitian diminta mengisi lembar skala psikologi sesuai dengan keadaan diri subjek penelitian. Skala psikologi terdiri atas empat bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan terkait dengan informasi demografis, bagian kedua berisi skala persepsi generasi Z terhadap kandidat perempuan, bagian ketiga berisi skala modal sosial, dan bagian keempat berisi skala perilaku pemilih.

### III. Hasil Penelitian

#### A. Persepsi Terhadap Modal Sosial Kandidat Perempuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Generasi Z terhadap kandidat perempuan ditinjau dari aspek modal sosial. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih minimnya keterpilihan kandidat perempuan dalam setiap pelaksanaan kontestasi di pemilihan umum. Selain itu kiprah perempuan dalam berbagai bidang juga masih minim. Oleh karena itu dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah persepsi generasi z terhadap kandidat perempuan dari aspek modal sosial.

Dalam penelitian ini modal sosial yang dimaksud adalah modal yang dimiliki oleh figur kandidat karena faktor figur dan jaringan yang dimiliki kandidat sehingga muncul kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Menurut Robert Putnam (1993) bahwa modal sosial adalah suatu hubungan saling percaya antara anggota masyarakat dengan pemimpinnya. Artinya diperlukan adanya ikatan atau jaringan sosial serta norma yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Bourdieu (1970) dalam (Ananda & Valentina, 2021), modal sosial diartikan sebagai sumber daya actual dan potensial yang dimiliki seseorang yang bersumber dari jaringan sosial yang terlembaga dan berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan hubungan timbal balik sehingga anggotanya memberikan dukungan secara kolektif.

Kajian tentang modal sosial kandidat perempuan tidak sebanyak pembahasan mengenai modal politik ((Fajar Lagabuana et al., 2021; Firmansyah & Faradhila, 2022; Kartika et al., 2018; Yunita et al., 2022) atau gabungan antara modal politik dan modal sosial ((Ananda & Valentina, 2021; Indira & Mariyah, 2021). Dengan demikian kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian yang sebelumnya, termasuk lokusnya yakni Generasi Z yang dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai pemilih pemula (Rofieq, 2016).

Pertanyaan berikut terkait dengan modal sosial yang dimiliki oleh kandidat perempuan. Terdapat sepuluh pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dan diperoleh jawaban sebagai berikut.

**Tabel 1. Tabulasi Jawaban Responden Terkait Modal Sosial Kandidat Perempuan (dalam %)**

No	Pertanyaan	Jawaban (%)				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kandidat perempuan tidak memiliki hubungan sosial yang luas	3,6	10,7	33,9	44,6	7,1
2	Hubungan sosial yang dibangun kandidat perempuan bersumber dari diri sendiri	8,9	50	28,6	14,3	-
3	Kandidat perempuan menggunakan berbagai media sosial dalam berinteraksi	17,9	60,7	17,9	3,6	-
4	Kandidat perempuan memiliki relasi sosial yang sudah lama terjalin	8,9	42,9	46,4	1,8	-
5	Faktor orang dekat berpengaruh terhadap relasi yang dibangun kandidat	39,3	48,2	12,5	-	-
6	Jaringan yang dimiliki kandidat perempuan tidak seluas yang dimiliki kandidat laki-laki	14,3	21,4	35,7	25	3,6
7	Jaringan yang dimiliki kandidat perempuan cenderung sejenis (menurut jenis kelamin)	3,6	32,1	33,9	28,6	1,8
8	Kandidat perempuan tidak pernah melakukan praktik politik uang ( <i>money politic</i> )	-	7,1	32,1	48,2	12,5
9	Kandidat perempuan memiliki sifat keibuan	17,9	51,8	25	3,6	1,8
10	Kandidat perempuan selalu dekat dengan pendukungnya	10,7	17,9	67,9	1,8	1,8

Ketika ditanyakan mengenai hubungan sosial yang dimiliki oleh kandidat perempuan diperoleh hasil 51 persen menyatakan tidak sependapat. Sebanyak 33 menyatakan antara setuju dan tidak setuju. Jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa kandidat perempuan memiliki hubungan sosial yang luas. Bahkan tidak sedikit mereka memiliki komunitas tersendiri. Misalnya tergabung dalam majelis-majelis pengajian, arisan, dan sebagainya.

Demikian pula ketika ditanyakan mengenai sumber hubungan sosial yang dibangun kandidat perempuan yang berasal dari internal kandidat sendiri diperoleh jawaban 60 persen setuju dan sangat setuju. Sebanyak 14 persen menyatakan tidak setuju serta 26 persen menyatakan antara setuju dan tidak setuju. Mayoritas jawaban yang menyatakan setuju mematahkan anggapan selama ini bahwa hubungan sosial yang dibangun kandidat perempuan berasal dari suami atau orang tuanya. Mereka tidak bisa mengembangkan jaringan karena sudah dibentuk oleh suami atau orang tuanya.

Ketika ditanyakan sarana kandidat perempuan dalam berinteraksi menggunakan basis media sosial diperoleh jawaban 78 persen menyatakan setuju dan sangat setuju. Sebanyak 18 persen menyatakan antara setuju dan tidak setuju dan sisanya menyatakan tidak setuju. Jawaban ini menunjukkan bahwa kandidat perempuan tidak segan untuk

menyampaikan gagasannya atau kegiatannya melalui media sosial, baik itu melalui Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi memang menuntut untuk setiap individu, termasuk kandidat perempuan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Pertanyaan berikutnya terkait dengan durasi hubungan yang dibangun kandidat perempuan, dimana 51 persen responden menyatakan setuju bahwa kandidat perempuan menjalin relasi sosial yang cukup lama. Sebanyak 46 persen menyatakan antara setuju dan tidak setuju dan sisanya menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat perempuan sudah berinteraksi dengan konstituennya atau pendukungnya cukup lama.

Berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi sumber relasi yang dibangun kandidat, bahwa sebanyak 87 persen setuju ada faktor orang dekat. Sedangkan sisanya sebanyak 13 persen menjawab antara setuju dan tidak setuju. Dalam pandangan responden bagaimana pun relasi yang dibangun kandidat perempuan tidak terlepas dari bantuan orang dekat, baik itu suami, orang tua, rekan, sahabat, termasuk tim sukses. Kondisi ini memang wajar karena tidak hanya kandidat perempuan yang dipengaruhi oleh faktor orang dekat. Kandidat laki-laki pun dipengaruhi oleh faktor kedekatan pula.

Ketika ditanyakan mengenai keluasan jaringan yang dimiliki oleh kandidat perempuan, ternyata kandidat perempuan tidak memiliki jaringan yang sama luasnya dengan kandidat laki-laki. Faktor orang dekat pada kandidat perempuan berpengaruh terhadap jaringan yang dimilikinya. Memang temuan ini tidak bisa dijadikan dasar, karena tidak sedikit kandidat perempuan memiliki jaringan yang lebih luas dari laki-laki. Hal ini dimungkinkan dari keluwesan perempuan dalam bergaul dan berkomunikasi.

Dalam hal jaringan yang dimiliki kandidat perempuan yang didasarkan pada kesamaan jenis kelamin ditemukan jawaban setuju sebesar 40 persen. Sebanyak 34 persen menyatakan antara setuju dan tidak setuju dan sisanya menyatakan tidak setuju. Hal yang menarik adalah temuan dimana apakah kandidat tidak pernah melakukan praktik politik uang dan hasil yang diperoleh sebanyak 60 persen menyatakan tidak setuju. Jawaban antara setuju dan tidak setuju sebanyak 32 persen dan sisanya menyatakan setuju. Artinya praktik politik uang tidak hanya terjadi pada kandidat laki-laki saja, namun juga terjadi pada kandidat perempuan. Bagaimanapun praktik ini tidak dibenarkan dalam proses pemilihan umum.

Adapun ketika ditanyakan mengenai sifat yang dimiliki seorang kandidat perempuan yang keibuan, hampir sebagian besar responden menyatakan demikian. Hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak setuju dan sebanyak 25 persen menyatakan antara setuju dan tidak setuju. Hal ini menarik karena biasanya keterpilihan kandidat perempuan karena memiliki sifat keibuan dan feminis.

Dikaitkan dengan kedekatan kandidat perempuan dengan pendukungnya sebagian besar jawaban responden berada pada antara setuju dan tidak setuju. Sedangkan yang menyatakan setuju sebanyak 28 persen. Sisanya menyatakan tidak setuju. Jawaban yang diberikan responden sangat menarik karena ada persoalan dalam kedekatan kandidat perempuan dengan pendukungnya.

## B. Analisis

Tabel 1 menunjukkan bahwa subjek penelitian ini berjumlah 55 mahasiswa, yang terdiri atas 21 mahasiswa dan 34 mahasiswi. Mahasiswa pemilih pemula berjumlah 7 orang, sementara bukan pemilih pemula berjumlah 14 orang. Sedangkan mahasiswi bukan pemilih pemula berjumlah 11 orang dan pemilih pemula berjumlah 23 orang.

**Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian**

Jenis Kelamin	Jenis Pemilih	N	Mean	SD	SE	Coefficient of Variation
laki-laki	Bukan Pemilih Pemula	14	37.643	3.201	0.856	0.085
	Pemilih Pemula	7	36.857	3.625	1.370	0.098
Perempuan	Bukan Pemilih Pemula	11	39.636	3.414	1.029	0.086
	Pemilih Pemula	23	38.435	3.287	0.685	0.086

(sumber: output JASP)

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi terhadap kandidat perempuan ditinjau dari jenis kelamin ( $F=3,294$ ,  $p>0,075$ ) dan jenis pemilih ( $F=1,020$ ,  $p>0,317$ ). Ditinjau dari interaksi jenis kelamin dan jenis pemilih juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan ( $F=0,045$ ,  $p>0,833$ ). Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan, seperti yang tertera pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Two Way Anova**

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Jenis Kelamin	36.576	1	36.576	3.294	0.075
Jenis Pemilih	11.327	1	11.327	1.020	0.317
JK * Pemilih	0.496	1	0.496	0.045	0.833
Residuals	566.269	51	11.103		

(sumber: output JASP)

Tabel 3 menunjukkan bahwa ditinjau dari interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pemilih, laki-laki yang bukan pemilih pemula tingkat persepsinya lebih rendah terhadap kandidat perempuan ( $MM=37,643$ ) dibandingkan perempuan yang bukan pemilih pemula ( $MM=39,636$ ). Untuk pemilih pemula, perempuan lebih tinggi persepsinya terhadap kandidat perempuan ( $MM=38,435$ ) dibanding laki-laki ( $MM=36,857$ ). Selain itu, Tabel 3 juga menunjukkan bahwa perempuan, baik pemilih pemula maupun pemilih bukan pemula, memiliki tingkat persepsi yang lebih tinggi terhadap kandidat perempuan dibanding laki-laki, baik itu pemilih pemula maupun bukan pemilih pemula.

**Tabel 4. Hasil Marginal Means**

Jenis Kelamin	Jenis Pemilih	Marginal Mean	95% CI for Mean Difference		
			Lower	Upper	SE
laki-laki	Bukan Pemilih Pemula	37.643	35.855	39.431	0.891
Perempuan		39.636	37.619	41.653	1.005
laki-laki	Pemilih Pemula	36.857	34.329	39.386	1.259

Jenis Kelamin	Jenis Pemilih	Marginal Mean	95% CI for Mean Difference		SE
			Lower	Upper	
Perempuan		38.435	37.040	39.830	0.695

(sumber: output JASP)

#### IV. Kesimpulan

Terdapat sejumlah temuan terkait persepsi pemilih Generasi Z terhadap kandidat perempuan dari aspek modal sosialnya. Persepsi Generasi Z terhadap kandidat perempuan ditinjau dari aspek modal sosial menunjukkan terdapat perbedaan antara pemilih pemula perempuan dengan pemilih pemula laki-laki, dimana pemilih pemula perempuan memiliki persepsi yang tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula laki-laki terhadap kandidat perempuan. Demikian pula ditemukan perbedaan antara responden bukan pemilih pemula perempuan dengan responden bukan pemilih pemula laki-laki, dimana responden bukan pemilih pemula perempuan memiliki persepsi yang tinggi terhadap kandidat perempuan dibandingkan bukan pemilih pemula laki-laki.

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari segi variabel pengaruh, variabel kontrol, metode yang digunakan, teknik analisa data, jumlah sampel, dan wilayah penelitian. Oleh sebab itu, untuk lebih memperkaya kajian mengenai persepsi pemilih generasi Z terhadap kandidat perempuan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan dengan variabel pengaruh lainnya serta menggunakan metode tertentu yang dapat menjelaskan mengenai persepsi pemilih generasi Z terhadap kandidat perempuan.

#### Referensi

- Ananda, R., & Valentina, T. R. (2021). Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 169–185. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2496>
- Bessel, Sharon. (2010). "Increasing The Proportion of Women in the National Parliament: Opportunitites, Barriers, and Chalengges". Dalam Edward Aspinall and Marcus Mietzner (ed). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing: p. 219-242
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quatitative and qualitative research* (Vol. 21). Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quatitative and qualitative research* (Vol. 21, Issue 1).
- Djojosoekarto, Agung dan Utama Sadjaja (ed.) (2008). *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan dan STI
- Fajar Lagabuana, B., Sukri, S., & Haryanto, H. (2021). Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Transformative*, 7(2), 157–173. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1>

- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>
- Firmansyah, J., & Faradhila, S. (2022). MODAL POLITIK KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Trias Politika*, 6.
- Fitriyah and Supratiwi, (2015). “The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014, *Jurnal Komunitas*, Vol.7, No.1: p.157-165
- Kartika, I., Rahmatunnisa, M., & Neneng Yani Yuningsih, dan. (2018). *MODAL POLITIK TJHAI CHUI MIE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2017*. 3(2), 139–149.
- Matland, R.E (2005). “Enhancing Women’s Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral Systems” dalam Julie Ballington et Azza Karam (eds). *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Stockolm: IDEA: p.93-111
- Rofieq, A. (2016). PILIHAN POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (SURVEY PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI ANGKATAN 2013/2014). *Kybernan*, 7(1), 29–38.
- Sharma, Anju (2014). “Realizing Gender Responsive Governance & Gender Equality Representatives in Democratic Society: A Concrete situation of Women Empowerment & Participation in Politics”, *International Journal of Informative & Futuristic Research (IJIFR)*, Vol 2, Issue 1
- Shvedova, Nadezhda (2005). Obstacles to Women’s Participation in Parliament. dalam Julie Ballington et Azza Karam (eds). *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Stockolm: IDEA: p. 33-51
- Yunita, E., Syukri, A., & Fikri, S. (2022). Modal Politik Keterpilihan Evy Susanti Sebagai Anggota Legislatif Kota. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 3(3), 184–192.